

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat sejak dahulu tidak bisa terelakan dalam praktiknya sejak selalu ada hubungan manusia, antara individu dan masyarakat sudah menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan, hubungan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk dapat memberikan kebermanfaatn dalam mewujudkan ekosistem masyarakat yang beradab dan sejahtera, Adapun konsep masyarakat yang beradab selalu mengacu kepada konsep masyarakat madani yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad di madinah, sebagaimana di Madinah peranan pemimpin kala itu yakni Nabi Muhammad membentuk dasar-dasar masyarakat madani dengan berbagai unsur-unsur penduduk yang berada di Madinah bersepakat untuk dapat hidup bersama dan berdampingan dalam suatu dokumen yang bernama Piagam Madinah. Sehingga konsep masyarakat madani direduksi dalam praktik kenegaraan di Indonesia oleh cendikiawan muslim yakni Nurcholish Madjid dengan semangat masyarakat yang maju dengan membawa dampak kemakmuran (Madjid, 2008, hlm 156). Dengan demikian kemampuan menghasilkan materil oleh masyarakat yang meningkat dapat menjadi nilai positif sekaligus mengangkat derajat kemanusiaan, baik secara individu maupun kelompok. Sebab, harkat atau derajat kemanusiaan adalah pusat kebahagiaan dan akan didapatkan hanya dalam kondisi setiap individu memiliki memiliki kebebasan untuk mengembangkan dirinya. Tetapi setiap pilihan menghasilkan sebuah konsekuensi, dengan kemakmuran yang dicita-cita pada membutuhkan pengorbanan yakni kemanusiaan itu sendiri (Madjid, 2008, hlm 157).

Oleh karena itu, konsep masyarakat madani secara tidak langsung mendukung cita-cita bangsa melalui pembangunan nasional. Pada dasarnya pembangunan nasional memiliki sasaran agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang madani dengan kemakmuran, hal ini disebabkan bangsa Indonesia menyadari dengan keadaan yang lebih baik secara kehidupan dapat

memungkinkan masyarakat lebih terbuka dalam berpartisipasi dalam pembangunan disemua bidang. Pada hakikatnya setiap pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu untuk dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri maka potensi sumber daya alam harus dapat dimanfaatkan secara maksimal dan potensi sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan lagi dari aspek pengetahuan dan keterampilannya.

Di Indonesia pembangunan dimulai dari tingkat terendah secara struktur pemerintahan yakni desa. Pembangunan desa pada hakikatnya merupakan upaya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah, mulai dari pembangunan yang menggunakan sumber daya dari desa itu sendiri maupun bantuan dari pemerintah agar terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik atau dalam hal ini adalah masyarakat Makmur dengan konsep masyarakat madani. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 (8) menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, jumlah desa di Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah desa di Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya, sesuai data pada tahun 2019 terdapat 83.820 desa, sedangkan pada tahun 2021 jumlah desa menjadi 83.843. (https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/BEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/Da_02/1, 2022). Adapun berdasarkan program pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan secara merata dengan membangun Indonesia dari daerah pinggiran dapat dilihat bahwa negara Indonesia sangat luas dan masih banyak daerah atau desa yang masih sangat membutuhkan pembangunan, sebab pembangunan desa menjadi salah satu aspek yang sangat penting demi kelangsungan hidup masyarakat yang berada di desa.

Pemerintah Indonesia untuk dapat mewujudkan pembangunan desa yang merata telah meluncurkan program prioritas melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yakni program PRUKADES (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan), Membangun EMBUNG DESA, mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan membangun RAGA DESA (Sarana Olahraga Desa) (https://www.kemendes.go.id/berita/content/detail_infografis/4%20Program%20Prioritas%20Pembangunan%20Desa, 2022). Dengan demikian realitas yang terjadi pada masyarakat menunjukkan bahwa dalam pembangunan desa selama ini mengalami banyak kendala yang disebabkan oleh terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang dapat menjangkau daerah pedesaan, dengan kondisi tersebut, maka sangat diperlukan peran kepala desa untuk dapat mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat desa, pemerintah melalui perangkat desa harus terus mendorong agar pembangunan desa dapat dijalankan secara partisipatif antar masyarakat dengan pemerintah.

Dalam melakukan pembangunan desa maka ada dua kategori yakni pembangunan secara fisik dan non fisik. Selaras menurut (B.S .Muljana, 2001, hlm 47) Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya fisik yakni infrastruktur dan prasarana dalam bentuk fisik. Adapun pembangunan secara fisik seperti jalan, jembatan, pasarm pertanian dan irigasi. Selain itu juga pembangunan secara non fisik juga menjadi penunjang dalam pembangunan desa. Didalam pembangunan suatu wilayah tidak hanya melakukan program pembangunan yang bersifat fisik saja, melainkan harus juga bergerak dibidang pembangunan non-fisik atau sosial (Effendi Bachtiar, 2002, hlm 114). Oleh karena itu harus ada penyangga pembangunan secara non-fisik seperti pembangunan manusia, Kesehatan, ekonomi dan pendidikan.

Lebih lanjut, dalam praktiknya dalam pembangunan di desa yang memegang tanggung jawab penuh ialah kepala desa. Sesuai yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 (1) menyatakan kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih jauh lagi, dalam melaksanakan tugasnya seorang kepala desa

memiliki wewenang salah satunya yaitu mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (2) bagian M. Oleh karenanya seorang kepala desa memiliki peran sebagai pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya untuk melakukan pembangunan desa bersama masyarakat dari semua elemen yang berada di wilayah desa.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi nilai penting dalam keberhasilan sebuah pembangunan. Terkhusus di era saat ini sangatlah sulit untuk dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peran pentingnya dalam upaya-upaya pembangunan desa dan kondisi sosial, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat hingga pada akhirnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Slamet menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada proses pembanguann akan dapat terwujud sebagai sebuah kenyataan apabila memenuhi faktor-faktor yang mendukungnya, yakni:

(a) adanya kesempatan, yakni adanya kondisi lingkungan dan suasana secara sadar oleh orang tersebut bahwa ia memiliki peluang untuk berpartisipasi. (b) adanya kemauan, yakni terdapat dorongan yang dapat menumbuhkan minat dan sikap seseorang untuk termotivasi berpartisipasi, dan (c) adanya kemampuan, yakni adanya keyakinan dalam diri bahwasnya setiap individu memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, baik dari segi pemikiran, waktu, atau material lainnya. (Nurbaiti, Siti Robiah & Bambang, 2017, hlm 8)

Pada akhirnya seorang kepala desa memiliki peranan penting untuk dapat menggerakkan masyarakatnya dengan berbagai cara, mulai dari memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal tersebut dapat dimulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat desa bukan lagi menjadi sebuah objek dalam melakukan pembangunan, melainkan masyarakat menjadi pelaku pembangunan desa dengan peran seorang kepala desa sebagai motivator dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan suatu desa dapat membantu pemerintah desa untuk mengetahui kondisi, kebutuhan serta sikap dari masyarakat desa, hingga pada akhirnya pembangunan yang terjadi di sebuah desa itu memang sejatinya untuk mewujudkan masyarakat madani. Peranan

pemerintah desa dalam hal ini ialah kepala desa dalam melakukan pembangunan melibatkan masyarakat dapat menjadi pacuan bagi masyarakat untuk lebih aktif dan mempunyai rasa memiliki dan membangun di desa, mulai dari pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik sehingga dapat membentuk tatanan masyarakat madani dengan peran pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat.

Pembangunan dengan melibatkan masyarakat merupakan salah satu usaha dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat desa. Dewasa hari ini, partisipasi selalu dikaitkan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu dalam melakukan pembangunan harus adanya partisipasi, sebab keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketika keduanya dikaitkan maka dalam pembangunan desa akan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa agar dapat tergerak untuk melakukan perubahan secara aktif guna menuju tatanan masyarakat madani. Sebab targetan utama dalam pembangunan adalah manusia, maka dari itu dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selaras menurut Tesyalom Sembel dkk mengutip dari Sastrosapoetro menyatakan ada beberapa jenis partisipasi masyarakat, yakni: (Sembel et al., 2017, hlm 5) Partisipasi pemikiran, Partisipasi keterampilan, Partisipasi tenaga, Partisipasi harta benda, dan Partisipasi materil/uang

Adapun partisipasi yang dapat dilakukan oleh semua elemen masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan dimulai dari proses identifikasi masalah serta potensi yang ada di masyarakat, melakukan pemilihan dan pengambilan keputusan tentang solusi untuk dapat menanggapi masalah yang ada, dan pelaksanaan untuk mengatasi masalah serta keterlibatan masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi (Isbandi, 2012, hlm 227-231), partisipasi tersebut dapat masuk kedalam kategori partisipasi pemikiran.

Lebih lanjut, pada akhirnya peranan kepala desa sangatlah berpengaruh untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal ini bukanlah hal yang mudah, sebagai penyelenggara

tertinggi pemerintahan desa seorang kepala desa harus mendapat pengakuan penuh dari semua masyarakatnya, disukai serta harus memiliki keahlian dalam memimpin dan mengkonsolidir masyarakat dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat desa.

Peranan yang sangat penting bagi seorang kepala desa ialah gaya kepemimpinan, sebab gaya kepemimpinan yang baik berasal dari pemimpin yang baik. Kepemimpinan seorang kepala desa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai, sikap maupun persepsi yang ada di dalam diri seorang pemimpin dalam hal ini ialah kepala desa. Secara mendasar dalam pembangunan desa dengan kepemimpinan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu pemimpin yang cerdas dan merakyat.

Desa Cintaasih yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang merupakan salah satu dari sekian banyak desa yang berada di Karawang yang juga menjadi ujung tombak dari pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, pembangunan desa Cintaasih merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memuat indikator keberhasilannya juga harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menuju masyarakat madani. Peranan kepala desa Cintaasih sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 (2) bagian M yakni mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasi, dalam hal ini ialah peran kepala desa dengan melakukan penampungan aspirasi dan memahami hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhirnya arah pembangunan desa akan tepat sasaran dan memberi kebermanfaatn bagi masyarakat desa secara menyeluruh.

Pembangunan di desa Cintaasih (Hasil-Hasil Musrenbang Desa Cintaasih T.A 2021, n.d.) sesuai hasil Musrenbang tahun anggaran 2021 masih terdapat beberapa yang belum terealisasi, salah satunya yakni infrastruktur secara fisik seperti posyandu, jalan penghubung antar dusun dan fasilitas olahraga, sebab pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pembangunan yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Cintaasih.

Dalam hal ini, aspek peranan kepala desa nyatanya menjadi faktor kunci kegagalan maupun keberhasilan dalam mengkonsolidir dan menggerakkan masyarakat agar program pembangunan desa dapat berjalan secara maksimal.

Dari uraian diatas maka peneliti merasa penting untuk dapat meneliti lebih dalam dan lebih jauh mengenai permasalahan diatas. Maka dalam penelttian ini peneliti mengajukan judul penelitian **“Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Menuju Masyarakat Madani (Studi Kasus Di Desa Cintaasih Kabupaten Karawang”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka sebuah masalah penelitian dapat diidentifikasi harus memiliki hubungan, dampak dan sebab akibat. Oleh karena itu pada penelttian ini, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang harus diteliti yakni:

1. Kurang maksimalnya program kerja Kepala Desa Cintaasih dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa
2. Kurangnya peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk menuju masyarakat madani
3. Rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa nenuju masyarakat madani
4. Adanya pembangunan desa yang terhambat akibat kurangnya partisipasi masyarakat

C. RUMUSAN MASALAH

Hadirnya rumusan masalah dalam sebuah penelitian bermaksud untuk dapat merumuskan masalah yang akan diteliti oleh peneliti secara jelas dengan tujuan agar masalah dalam penelitian terarah dan mudah dalam memecahkan masalah peneltiain. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana program Kepala Desa Cintaasih dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menuju masyarakat madani?
2. Bagaimana realitas partisipasi masyarakat desa Cintaasih dalam pembangunan desa menuju masyarakat madani?
3. Bagaimana kepala desa merealisasikan program dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembangunan desa menuju masyarakat madani?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi kepala desa dalam merealisasikan program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembangunan desa menuju masyarakat madani?
5. Bagaimana solusi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Cintaasih menuju masyarakat madani?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas, maka tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui:

1. Program Kepala Desa Cintaasih dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menuju masyarakat madani
2. Realitas partisipasi masyarakat Desa Cintaasih dalam pembangunan desa menuju masyarakat madani
3. Kepala desa merealisasikan program dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembangunan desa menuju masyarakat madani?
4. Kendala yang dihadapi kepala desa dalam merealisasikan program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembangunan desa menuju masyarakat madani
5. Solusi Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Cintaasih menuju masyarakat madani

E. MANFAAT PENELITIAN

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka penelitian ini diharapkan mencakup 2 (dua) manfaat penelitian bagi banyak pihak yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berguna untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam studi kasus peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menuju masyarakat madani

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

a. Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat berguna menjadi sebuah aplikasi ilmu pengetahuan, yakni dalam mengkaji sebuah studi kasus mengenai peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan menuju masyarakat madani

b. Manfaat Bagi Universitas

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan juga menjadi gambaran untuk digunakan sebagai referensi mahasiswa Universitas Pasundan dengan tema penelitian yang sama.

c. Manfaat Bagi Khalayak

Peneliti mengharapkan penelitian ini mewujudkan hasil yang dapat memberikan pemahaman kepada khalayak umum tentang mengkaji sebuah studi kasus mengenai peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan menuju masyarakat madani

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan turunan dari data-data penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan variabel yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga secara rasional variabel dalam judul penelitian dapat didefinisikan yakni:

1. Peran

Soerjono Soekanto dalam Muhamad Harikal Ramadhan (Ramadhan, 2021, hlm 21) mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi seseorang dalam menyesuaikan diri dan sebagai sebuah proses atau lebih tepatnya adalah ketika seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat atau sosial serta menjalankan suatu peranan. Lebih lanjut, peranan disini adalah sebuah aktivitas yang dijalankan oleh kepala desa Cintaasih sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 (2) bagian M, dimana terdapat peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi pembangunan desa.

2. Kepala Desa

Kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah perangkat pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa serta melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Dalam hal ini kepala desa dalam artian sebagai orang yang paling tinggi jabatannya dalam menjalankan pemerintahan desa Cintaasih.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikutsertaan warga atau masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang legal serta merepresentatif kepentingan masyarakat. Adapun bentuk partisipasi menyeluruh dikonstruksikan berdasarkan prinsip demokrasi yaitu kebebasan dalam berkumpul serta mengemukakan pendapat secara membangun (Ubaedillah, 2000, hlm 200)

4. Pembangunan Desa

Pada prinsipnya pembangunan secara umum ialah pergeseran dari suatu kondisi yang dipandang menjadi lebih baik dan lebih berharga. Selain itu pembangunan merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan penting dalam struktur dan sistem sosial ekonomi serta sikap masyarakat maupun Lembaga (Suryono, 2010, hlm 257)

5. Masyarakat Madani

Masyarakat madani menurut Nurchloish Madjid ialah masyarakat madani sebagai masyarakat yang memiliki peradaban dengan meneladani sikap Nabi Muhammad (Madjid, 1999, hlm 87). Dengan artian dengan konsep masyarakat madani yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid dimana ingin membentuk tatanan masyarakat seperti di Madina, msayarakat dapat hidup dengan damai dan Makmur tanpa adanya konflik.

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penulisan skripsi memuat mengenai rincian-rincian urutan dalam penulisan yang memiliki tujuan untuk mempermudah pengerjaan skripsi agar lebih sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi di kategorikan menjadi 5 bab yang mencakup:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab I ini berisikan komponen:

- A. Latar belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Definisi Operasional
- G. Sistematika Skripsi

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab II ini berisikan komponen:

- A. Kajian Teori
- B. Kerangka Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab III berisikan kompinen teknik melakukan penelitian yang ingin peneliti lakukan, yang berisikan komponen:

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Kehadiran Penelitian
- C. Instrumen Penelitian
- D. Sumber Data
- E. Prosedur Pengumpulan Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini memuat hasil umum riset dan analisis penelitian dengan kategori:

- A. Temuan Penelitian
- B. Pembahasan Temuan Penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir dari skripsi ini adalah bab V dengan komponen sebagai berikut:

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN